

TATA KELOLA AKSELERASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

Simon Sumanjoyo Hutagalung

Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung

E-mail: simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK, Perkembangan daerah otonom baru membutuhkan daya dukung tata kelola yang kuat agar dapat berakselerasi dengan daerah lainnya dalam membangun pendidikan. Tata kelola yang sinergis menghasilkan pengelolaan pendidikan yang berkapasitas baik. Penelitian yang dilakukan bertujuan mengidentifikasi kondisi existing, faktor yang mendorong kondisi pendidikan dan potensi kelembagaan dan hubungan antar lembaga yang dapat membangun suatu model. Penelitian kualitatif ini dalam pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan *focus group discussion*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu; (1). Kondisi existing sumber daya pendidikan masih menghadapi kuantitas sekolah yang belum memenuhi rasio nasional dan distribusi guru belum merata. Anggaran belum optimal dimiliki oleh Dinas Pendidikan, sehingga belum menghasilkan program yang dapat mengakselerasi pendidikan. (2). Faktor yang dominan mempengaruhi kondisi sumber daya pendidikan itu antara lain warisan kebijakan pendidikan yang tidak berhasil menciptakan pemerataan infrastruktur pendidikan serta kondisi daya dukung infrastruktur yang belum maksimal bagi terciptanya akselerasi pendidikan di wilayah tersebut. (3). Potensi kelembagaan dan hubungan antar lembaga terletak pada peran Dinas Pendidikan, Instansi pemerintah lainnya pada Kabupaten Pesisir Barat, pihak swasta/yayasan atau lembaga masyarakat serta instansi pendidikan yang ada di luar wilayah Pesisir Barat. Keseluruhan lembaga tersebut memiliki format keterlibatannya yang terjalin dalam suatu kerangka kerja yang diarahkan oleh Pemkab Pesisir Barat. Hubungan inilah yang membangun model tata kelola yang mengakselerasi penyelenggaraan pendidikan.

Kata kunci: kebijakan pendidikan; pemekaran daerah; tata kelola

GOVERNANCE OF EDUCATION ACCELERATION IN PESISIR BARAT REGENCY LAMPUNG PROVINCE

ABSTRACT, Development of new autonomous regions requires a strong carrying capacity of governance in order to accelerate with other regions in educational development. Synergistic governance will result an education management with good capacity. The research aimed to identify existing conditions, factors that encourage educational conditions and institutional potential and relationships between institutions that can build a model. This qualitative research in collecting data using interview, observation and focus group discussion. Data analysis is done qualitatively with interactive model. This research yields several conclusions; (1). Existing condition of educational resources still faces the quantity of schools that have not met the national ratio and the teacher distribution has not been evenly distributed. The budget has not optimally owned by education office, so it has not produced a program that can accelerate education. (2). Dominant factors influencing the condition of educational resources include the legacy of education policy that has not succeeded in creating equitable distribution of educational infrastructure and the condition of the carrying capacity of infrastructure that has not been maximized for the acceleration of education in the region. (3). Institutional and inter-institutional potential relationships in the Pesisir Barat District area lies in the role of the Education Office, other government agencies, private parties/ foundations or community institutions and educational institutions outside the Pesisir Barat region. The entire institution has its own format of engagement which is related in a framework directed by the Pesisir Barat Government. This relationship then builds a model of governance that accelerates the delivery of education.

Key words: education policy; regional expansion; governance

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia berada pada kondisi yang tertinggal dari negara tetangga. *Political and Economic Risk Consultant*, dalam survey tentang kualitas pendidikan, menyimpulkan bahwa Indonesia berada di urutan akhir dari 12 negara di Asia. Survey *World Competitiveness Year Book* pada tahun 2007 tentang daya saing pendidikan menunjukkan bahwa Indonesia berada pada urutan 53 dari 55 negara yang disurvei. Implikasi dari kualitas pendidikan tersebut dapat dilihat dari *Human Development Index* Indonesia. *United Nation Development Programe* dalam HDI tahun 2007 menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ke 107 dari 177 negara yang disurvei. Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati urutan ke 7 dari sembilan negara ASEAN (Syamsuri, 2010 dalam Lisnawati, 2011).

Selain isu kebijakan dan manajemen pendidikan,

alokasi dan pendistribusian anggaran pendidikan menjadi faktor yang menyebabkan kondisi tersebut. Hal ini wajar karena kurangnya alokasi anggaran dan distribusi mengakibatkan kurangnya dukungan pengembangan pendidikan. Sistem anggaran pendidikan di Indonesia juga sangat rumit, dan tidak ada mekanisme untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang pendanaan sekolah atau membandingkan perbedaan antara biaya pendidikan (Clark, 1998: 25 dalam Arifi, 2008: 124). Kenaikan anggaran pendidikan mulai 2005-2009 cukup mencengangkan, kenaikan rasionya sangat signifikan. Namun secara keseluruhan, gaji guru mencapai persentase yang sangat besar dari keseluruhan anggaran pendidikan (Rahmawati, 2016: 14). Implikasinya adalah bahwa kondisi fasilitas pendukung pendidikan, seperti infrastruktur dan alat pengajaran, diprediksi tidak banyak berubah.

Selain itu, implikasi kondisi yang juga terjadi adalah profesionalitas guru di Indonesia yang belum membaik. Data Balitbang Depdiknas tahun 2007 menunjukkan bahwa guru Indonesia yang layak mengajar pada tingkat SD hanya 28,94%. Guru SMP negeri 54,12%, swasta 60,99%, guru SMA negeri 65,29%, swasta 64,73 %, guru SMK negeri 55,91 %, swasta 58,26 %. Kondisi guru ini salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan guru yang belum memadai. Dari 2,7 juta guru di Indonesia hanya sepertiganya atau 35% saja yang berpendidikan S1. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar guru tidak memiliki kelayakan untuk mengajar (Subrayanti, 2013: 3).

Kondisi-kondisi tersebut terjadi dalam sebaran tidak merata, artinya terdapat faktor demografis dan geografis yang terjadi pada lingkup kewilayahan tertentu (Oswald, Coutinho, Best, dan Singh, 2016). Kondisi baik pada wilayah dengan tingkat kemajuan lebih baik, akan berbanding terbalik pada wilayah yang belum maju. Sebagian besar kondisi itu justru terjadi pada wilayah yang belum maju. Bahkan dimungkinkan pada suatu wilayah memiliki distribusi kapasitas kelembagaan yang timpang. Karena itu distribusi kapasitas kelembagaan tersebut juga merupakan kendala bagi proses kebijakan penyelenggaraan pendidikan (Dobbins, 2014).

Meski demikian, melalui pendekatan relasional dan pengembangan kelembagaan, kondisi problematik tersebut juga memiliki potensi positif. Jika kondisi kapasitas kelembagaan yang sudah lebih dahulu mencapai kemajuan dalam aspek pengelolaan sumber daya (sarana dan SDM) diarahkan untuk memiliki jalinan dan interaksi spesifik dengan kelembagaan dengan tingkat kemajuan yang belum baik (Boron dan Thomson, 2017). Penciptaan hubungan *symbiosis* pada aspek ini dalam wujud aktivitas-aktivitas yang mengarah pada penciptaan kondisi keseimbangan kapasitas (Liu dan Li, 2016), sehingga persoalan ketimpangan kondisi kelembagaan dapat menemukan solusi yang lebih baik.

Memperhatikan kondisi dari masing-masing daerah yang berkembang secara berbeda serta melihat lingkup geografis dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai latar belakang yang menciptakan keberagaman kondisi penyelenggaraan pendidikan. Kondisi latar belakang yang beragam tersebut merupakan implikasi dari kelangkaan sumberdaya pendukung dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya itu dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks itu, kelembagaan merupakan unsur utama yang berkontribusi terhadap unsur lain agar pada kondisi yang optimum.

Meskipun pemerintah telah melakukan insiatif pengembangan penyelenggaraan pendidikan melalui beberapa program insentif dan stimulatif, namun yang perlu dimaknai bahwa program tersebut lebih bermakna alokasi dan distribusi sumber daya materiil kepada satuan penyelenggara pendidikan. Padahal, penyelenggaraan pendidikan juga mencakup aspek interaksi di dalam lembaga, antar lembaga penyelenggara pendidikan dan antara

lembaga penyelenggara pendidikan dengan lembaga lain yang bersinggungan dengan mereka. Dalam pendekatan interaksionalis, interaksi yang terjadi diantara lembaga dapat memberikan efek yang secara berkelanjutan akan memberikan implikasi bagi aktivitas yang diselenggarakan oleh masing-masing lembaga (Scruton dan McNamara, 2015). Interaksi yang bertentangan dan tidak mendukung satu dengan lainnya akan menciptakan kondisi yang kritis dan tidak kondusif bagi perkembangan lembaga. Interaksi yang terselenggara dengan baik dan saling mendukung, akan menciptakan kondisi aktivitas lembaga menjadi lebih kondusif bagi tumbuhnya perkembangan yang baik (Rubington dan Weinberg, 2015). Karena itu pengkajian terhadap potensi pengembangan tata kelola (*governance*) pada daerah otonom baru tersebut perlu ditelaah.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta *Focus Group Discussion*. Penelitian dilakukan untuk menganalisis tiga hal, yaitu; (1). Faktor-faktor yang mendukung kondisi pendidikan yang ada di daerah otonom baru, (2). Aspek potensial dalam pendidikan yang dapat berkontribusi pada pengembangan organisasi model tata kelola pendidikan, dan (3). Model tata kelola yang dapat mendukung percepatan penyelenggaraan pendidikan pada daerah otonom baru. Analisis data dilakukan dengan metode interaktif yang pada akhirnya dapat dihasilkan yang berkorelasi dan informasi bermanfaat bagi pengembangan model tata kelola pendidikan di daerah otonom baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Existing dan Faktor yang mempengaruhi kondisi sumber daya penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Pelayanan publik mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kondisi umum daerah itu sendiri (Abdullah, 2011). Kebijakan desentralisasi seharusnya memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan pelayanan publik (Habibi, 2015). Kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakatnya pasca pemekaran daerah (dalam hal daerah administratif dan perencanaan pelayanan) menjadikan pemerintah daerah diharapkan dapat lebih bijak dalam merencanakan pembangunan pelayanan publik.

Idealnya pembangunan fasilitas pelayanan daerah sudah seharusnya disesuaikan dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya (Pohan, 2015). Semakin banyak jumlah penduduk disuatu daerah maka sewajarnya jumlah penyediaan layanan juga ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat (Tjiptoherijanto, 1999). Fasilitas pendidikan yang memadai akan mendukung peningkatan kualitas

masyarakat sehingga pendidikan dan kesehatanpun menjadi indikator penting bagi nilai IPM suatu daerah.

Apabila dicermati secara lebih lanjut, kondisi infrastruktur sekolah pada wilayah Kabupaten Pesisir Barat belum mencapai standar nasional. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia yaitu SNI 03-6981-2004, satu buah fasilitas Sekolah Dasar (SD) wajib disediakan untuk minimal penduduk sejumlah 1600 jiwa, sedangkan untuk SMP dan SMA sejumlah 4800 jiwa. Apabila dihitung secara cermat, hampir keseluruhan wilayah kecamatan di Pesisir Barat sudah memenuhi rasio tersebut. Tercatat hanya dua kecamatan yang belum memenuhi rasio tersebut, yaitu Kecamatan Bengkunt Belimbing dan Kecamatan Ngambur. Data tersebut dapat dilihat dari tabel 1.

Kondisi rasio yang hampir serupa juga terjadi pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Terlebih dahulu data rasio tersebut terlihat dari tabel 2.

Dari tabel 2 tersebut dapat dicermati jika rasio jumlah sekolah dengan penduduk pada jenjang pendidikan menengah dan atas hampir sebagian besar wilayah

belum mencapai rasio ideal. Tercatat Kecamatan Karya Penggawa, Way Krui, Pesisir Tengah, Krui Selatan, Pesisir Selatan dan Ngambur belum memenuhi rasio ideal tersebut. Hanya Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Pulau Pisang, Bengkunt dan Bengkunt Belimbing yang sudah memenuhi rasio ideal tersebut.

Setelah mencermati kedua rasio tersebut, maka dapat dikemukakan jika tersedianya sekolah *existing* pada Kabupaten Pesisir Barat bila dibandingkan dengan jumlah penduduk nampak belum seimbang, bertambahnya jumlah penduduk tidak sebanding dengan peningkatan penyediaan sekolah diberbagai tarafnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penambahan jumlah penyediaan sekolah guna menunjang pemerataan pelayanan, serta peningkatan kesejahteraan (Bank Dunia, 2013).

Selain peninjauan terhadap kesesuaian jumlah infrastruktur eksisting dengan standar yang berlaku, kualitas pelayanan dalam sektor pendidikan juga dapat dikatakan semakin baik jika angka rasio murid terhadap guru semakin kecil dalam perkembangannya (Bank Dunia, 2013). Namun perlu untuk ditinjau lebih lanjut apakah

Tabel 1. Rasio Jumlah Sekolah Dasar Terhadap Jumlah Penduduk di Kab. Pesisir Barat

No	Kecamatan	SD		Jumlah Penduduk (2012)	Rasio Ideal (1/1600)	Status Terpenuhi
		Negeri	Swasta			
1	Lemong	16	1	14365	9	T
2	Pesisir Utara	12	0	8202	5	T
3	Pulau Pisang	2	0	1343	1	T
4	Karya Penggawa	11	1	14292	9	T
5	Way Krui	5	0	8328	5	T
6	Pesisir Tengah	11	2	18358	11	T
7	Krui Selatan	8	0	8531	5	T
8	Pesisir Selatan	17	0	21762	14	T
9	Ngambur	10	0	17953	11	B
10	Bengkunt	6	0	7620	5	T
11	Bengkunt Belimbing	12	1	24000	15	B
Jumlah		110	5			

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat, diolah peneliti (2015).

Tabel 2. Rasio Jumlah SLTP dan SLTA Terhadap Penduduk di Kab. Pesisir Barat

No	Kecamatan	SLTP		SLTA		SMK		Jumlah Penduduk (2012)	Rasio Ideal (1/4800)	Status Terpenuhi
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta			
1	Lemong	6	0	1	0	0	0	14365	3	T
2	Pesisir Utara	2	0	1	0	0	0	8202	2	T
3	Pulau Pisang	1	0	0	0	0	0	1343	0	T
4	Karya Penggawa	1	0	1	0	0	0	14292	3	B
5	Way Krui	1	0	0	0	0	0	8328	2	B
6	Pesisir Tengah	3	0	1	2	1	1	18358	4	B
7	Krui Selatan	0	1	0	1	0	0	8531	2	B
8	Pesisir Selatan	4	1	1	0	0	0	21762	5	B
9	Ngambur	3	2	1	0	1	0	17953	4	B
10	Bengkunt	3	1	1	0	0	0	7620	2	T
11	Bengkunt Belimbing	5	0	2	0	0	0	24000	5	T
Jumlah		29	5	9	3	2	1			

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kab. Pesisir Barat, diolah peneliti (2015).

penurunan rasio tersebut didasarkan pada peningkatan jumlah guru atau justru penurunan jumlah murid yang bersekolah.

Fasilitas pelayanan pendidikan jenjang menengah pertama belum tersedia hampir di setiap daerah terutama pedesaan. Selain itu, tenaga pengajar yang berkualitas masih terkonsentrasi di daerah-daerah yang baik perekonomiannya (Sulisworo, Nasir, dan Maryani, 2017). Padahal melalui adanya pemekaran daerah diharapkan adanya penataan dan penyiapan fasilitas pendidikan oleh pemerintah daerah semenjak tingkat dasar sampai tingkat lanjutan. Rentang kendali yang semakin dekat antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam aspek fasilitas pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah hasil pemekaran. Hadirnya daerah pemekaran baru sesungguhnya bisa menciptakan lowongan pekerjaan bagi tenaga pendidik.

Tersedianya tenaga pendidik yang berkualitas menjadi kunci keberhasilan sektor pendidikan di daerah pemekaran (Bank Dunia, 2013). Semakin rendah rasio jumlah pengajar dengan jumlah murid akan semakin efektif proses belajar-mengajar di sekolah di DOB (Khairunnisa, 2013). Perlu dicermati juga bahwa tidak semua tenaga pengajar mau melaksanakan tugas di daerah hasil pemekaran karena alasan tempat tinggal yang jauh dari sekolah (Meha dan Ismanto, 2013). Biasanya, tenaga pengajar tinggal tinggal di daerah induk hasil pemekaran (Zulyanto, Noeraini, Badriah, dan Istikomah, 2017).

Ditemukan juga beberapa sekolah yang kondisi infrastruktur belum tersentuh renovasi. Hal ini misalnya terjadi di salah satu bangunan sekolah di Pekon (desa) Wayharu, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Hampir seluruh bangunan sekolah tersebut dalam kondisi rusak. Beberapa bagian dinding bangunan yang terbuat dari panpan tampak belubang di sana-sini. Bagian atap, mulai lapuk termakan usia. Bahkan dikhawatirkan, roboh. Padahal, gedung sekolah merupakan tempat pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar dari tingkat SD, SMP dan SMA Filial (kelas jauh). Jumlah siswa di sekolah ini sekitar 1.000 orang yang berasal dari empat pekon yakni, Pemerihan, Wayharu, Badardalam dan Pekon Siringgading, Margono. Kerusakan bangunan sekolah itu sudah lama terjadi sejak wilayah tersebut masih menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Barat (Tahun 2009).

Kondisi sumber daya fisik berupa infrastruktur sekolah yang sebagian besar merupakan pelimpahan dari Kabupaten induk yang rusak tersebut perlu ditindaklanjuti agar tidak mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti pendidikan. Terlebih lagi setiap tahun dana BOS yang diterima Kabupaten Pesisir Barat semakin besar, sehingga alokasi kepada fasilitas bangunan sekolah tersebut niscaya dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Daya Dukung Fasilitas Pendukung di Kabupaten Pesisir Barat

Daya dukung fasilitas pendukung non pendidikan sesungguhnya juga dapat memberikan pengaruh terdapat optimalnya penyelenggaraan pendidikan di suatu daerah (Jeong, Lee, dan Cho, 2017). Dalam aspek ini dapat dicontohkan berupa fasilitas sumber daya listrik atau akses telekomunikasi. Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Pesisir Barat dihadapkan kepada kondisi infrastruktur yang masih minim. Hal ini misalnya berpengaruh terhadap penyelenggaraan beberapa program pendidikan yang berskala nasional, misalnya adalah penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UN CBT). Meski mulai tahun ini pemerintah mulai menggunakan sistem Computer Based Test (CBT) dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2014/2015 dari tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat belum bisa dilakukan di Kabupaten Pesisir Barat (KPB).

Belum siapnya satuan pendidikan yang ada dan belum masuk kriteria untuk mengikuti pelaksanaan UN CBT tersebut, yang salah satunya harus memiliki perangkat komputer sebanyak 40 unit setiap SMP atau SMA sederajat dan juga perlengkapan lainnya menjadi alasan utamanya. Daerah yang masuk kriteria dapat melaksanakan UN CBT tersebut yakni Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Lampung Tengah (Lamteng), Lampung Timur (Lamtim), Lampung Utara (Lampura), Pringsewu, Bandar Lampung dan Metro. Sedangkan, Pesisir Barat tidak masuk kriteria tersebut.

Guna mendukung pelaksanaan UN CBT ditahun berikutnya, Disdikbud Kabupaten Pesisir Barat akan melakukan berbagai persiapan sehingga kedepan dapat melaksanakan UN dengan sistem tersebut seperti halnya kabupaten lain. Namun, hal itu juga sesuai dengan perkembangan di satuan pendidikan yang ada di Pesisir Barat, yang diharapkan Disdikbud juga memiliki perlengkapan seperti perangkat komputer yang memenuhi standar serta perlengkapan lainnya. Menggunakan sistem CBT tersebut memang hanya memerlukan sinkronisasi data, kemudian data diujikan dan soal ujian tetap tersimpan di komputer. Pelaksanaan UN dengan CBT juga akan mendorong efektivitas anggaran karena tidak perlu melakukan pengadaan percetakan soal ujian seperti pada UN tertulis, selain itu juga pelaksanaan UN dengan CBT akan mendorong transformasi lebih modern dalam penilaian. Akan tetapi Kabupaten Pesisir Barat saat ini belum mampu untuk melaksanakan sistem tersebut (Marzuki, 2015).

Contoh pelaksanaan ujian nasional CBT ini merupakan wujud dari pengaruh infrastruktur pendukung yang belum tertata dengan baik akan memberikan dampak yang negatif terhadap penyelenggaraan masa depan pendidikan (Nurmandi, 2013). Oleh karena itu, pembangunan pendidikan perlu juga di akselerasi dengan pembangunan fasilitas fisik pendukung sehingga potensi masa depan pendidikan pada kabupaten ini tidak dihadapkan kepada kendala yang berarti (Lau, 2015).

Potensi-potensi kelembagaan penyelenggara pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Sebagai daerah otonom baru yang harus mengejar keteringgalan, dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat mulai berbenah. Bidang pendidikan merupakan salah satu program utama yang menjadi perhatian bagi pemerintahan yang baru beranjak 1,5 tahun usianya. Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) diketahui bahwa pembangunan bidang pendidikan sekarang ini tidak hanya fokus dibidang fisik, namun juga bidang non fisik menjadi perhatiannya. Bidang fisik, sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan nampak cukup memadai dari jenjang pendidikan menengah sampai ke jenjang pendidikan dasar.

Tahun Anggaran 2014 lalu Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memberi perhatian kepada bidang non fisik diantaranya mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan menyukseskan program nasional wajib belajar 12 tahun. Bapak Kepala Dinas Pendidikan mengemukakan bahwa untuk mendukung program pemerintah pusat maka rangkaian program dilaksanakan seperti Program Bantuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (BDPP), Program Bimbingan Kurikulum 2013 dan Program Seleksi Guru Berprestasi (Marzuki,2015).

Sistem pendidikan itu telah berjalan dari tahun 2014 namun program-program unggulan itu tidak akan dilaksanakan dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat dan elemen-elemen masyarakat lainnya, *stakeholder* dan orang tua murid. Seluruhnya harus beriringan serta saling mendukung, sehingga *output*-nya maksimal dengan menghasilkan siswa yang handal dan mampu bersaing didunia internasional.

Visi yang menjadi arah dalam penyelenggaraan pendidikan seringkali tidak dapat terimplementasi dikarenakan tidak sungguh-sungguh nya para pejabat publik dalam mengeksekusi visi tersebut. Sebagai akibatnya adalah tidak berkesinambungannya program dan kegiatan yang diselenggarakan guna pelaksanaan visi tersebut (Paulus, 2013). Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, konsistensi visi tersebut dapat dilihat dari variasi program yang dilaksanakan oleh seluruh elemen terkait, dimana dinas yang menjadi *leading sector*-nya memfasilitasi program tersebut.

Potensi hubungan kelembagaan dalam rangka akselerasi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Mencermati kondisi *existing*, faktor yang pengaruhi sumber daya pendidikan dan potensi kelembagaan di Kabupaten Pesisir Barat, maka dapat diidentifikasi potensi hubungan kelembagaan yang dapat ditempuh guna mengakselerasi penyelenggaraan pendidikan di wilayah kabupaten tersebut. Potensi hubungan kelembagaan tersebut digambarkan pada gambar 1. sebagai berikut:

Pola hubungan yang dapat diterapkan adalah pola yang menjalin posisi kemitraan strategis dengan beberapa komponen penting yang berkaitan dengan pendidikan di

wilayah Kabupaten Pesisir Barat. Komponen tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas atau instansi sektoral lainnya, pihak swasta, yayasan atau lembaga masyarakat dan juga pelibatan institusi pendidikan yang ada diluar kabupaten, khususnya pada tingkat provinsi Lampung.



Gambar 1. Pola Hubungan Kelembagaan Berbasis Kemitraan

Dalam hubungan kelembagaan tersebut dinas pendidikan dapat menyusun program yang nantinya akan memberikan ruang kepada komponen lembaga lainnya untuk turut berperan dalam pelaksanaan pendidikan, misalnya program yang merangkul perusahaan swasta, yayasan atau lembaga masyarakat untuk turut menurunkan sumber dayanya dalam proses pengajaran baik berupa sumber daya materiil maupun sumber daya manusia yang dimilikinya. Adanya ruang kepada mereka dapat secara bertahap meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah.

Terlibatnya dinas atau instansi lain pada Kabupaten Pesisir Barat diarahkan kepada penguatan kapasitas pendidikan dalam konteks identitas dinas/intansi lain tersebut. Misalnya dinas pariwisata melakukan program penguatan berbahasa Indonesia dan Inggris ke sekolah-sekolah di wilayah Pesisir Barat. Program ini nantinya bertujuan memberikan kapasitas komunikasi kepada para siswa sehingga dapat berinteraksi secara baik kepada wisatawan yang datang.

Komponen institusi pendidikan diluar Kabupaten Pesisir Barat juga dapat diberikan ruang untuk terlibat dalam pengembangan kualitas pendidikan di wilayah itu. Contoh pelibatan IBI Darma Jaya mendorong perlunya instansi pendidikan lain untuk diberikan kesempatan melaksanakan program dan kegiatan mereka di wilayah Pesisir Barat. Bahkan bila dimungkinkan dapat dilakukan melalui suatu program yang dirancang oleh Dinas Pendidikan, dimana program tersebut mendorong seluruh instansi pendidikan di Provinsi Lampung untuk turut mengembangkan kualitas pendidikan, sebagai *reward* kepada mereka maka pihak Pemerintah Kabupaten dapat mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap Pesisir Barat. Pola dan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif dari dan kepada semua *stakeholders* yang diawali dari perencanaan, dengan memperhatikan manfaat serta perubahan, baik tingkat perubahan jangka pendek

maupun jangka panjang (Lambelanova, 2017). Pola hubungan yang dirancang tersebut pada dasarnya bersifat saling menguntungkan, dimana seluruh komponen akan mendapatkan imbal balik yang positif dan institusi pendidikan di wilayah kabupaten Pesisir Barat juga akan mendapatkan pengaruh yang baik, sehingga kemudian dapat secara bertahap memperbaiki kualitas pendidikannya. Dibutuhkan juga perbaikan dalam penyusunan serta penetapan program yang sesuai kebutuhan guna mengimplementasikan kebijakan pendidikan dasar seperti tersedianya tenaga pendidik, ketersediaan sarana kegiatan pembelajaran dan biaya operasional, menempatkan pejabat yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keahlian pada bidangnya (Londa, 2016).

Model tata kelola dalam rangka akselerasi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.

Model yang ditawarkan untuk diterapkan guna tata kelola penyelenggaraan pendidikan pada Kabupaten Pesisir Barat adalah variasi model *New Public Management* yang dapat diterapkan dengan syarat didukung oleh politisi, birokrat dan masyarakat. NPM memiliki fokus pada meningkatkan efisiensi, aparatur publik yang terspesialisasi secara horisontal, kontrakisasi, marketisasi, gaya manajemen sektor swasta, standar kinerja yang eksplisit dan control terhadap keluaran/hasil (Christensen, 2012).

Dalam beberapa dekade terakhir dapat dikatakan belum ada model yang dominan (Pollitt dan Bouckaert, 2011). NPM telah dilengkapi dengan post-NPM, termasuk konsep utama seperti koordinasi, sentralisasi, pemerintahan, jaringan dan kemitraan. Mekanisme pencegahan nasional dan post-NPM tumpang tindih dan tidak saling eksklusif saat datang untuk alat-alat reformasi tertentu. Kedua paradigma itu tergabung ide-ide dari perspektif lain, dan keduanya mencakup praktek dan gagasan literatur akademis dari kedua model yang digabungkan (Klijn, 2011). Dengan demikian dapat disimpulkan jika reformasi pasca-NPM menyiratkan peningkatan fokus pada integrasi, koordinasi horizontal sejalan dengan pendekatan tata kelola dan peningkatan kontrol politik dan finalisasi (Pollitt, 2003), (Lægread dan Verhoest, 2010). Oleh karena itu model yang hendak dibangun dalam penelitian ini adalah model NPM yang bersinggungan dengan kemitraan dan koordinasi antar *stakeholder* yang kuat. Model tersebut dapat diilustrasikan pada gambar 2.

Dalam model tersebut pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendidikan memiliki peran utama untuk membangun kesepakatan bersama. Posisi mereka sebagai pihak yang mengkoordinasi penyelenggaraan pendidikan pada wilayahnya dengan mendorong Dinas Pendidikan serta Instansi Pemerintah Daerah lainnya agar mampu menciptakan program yang inovatif dan mendorong akselerasi kapasitas pendidikan. Selain itu mereka juga melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap

program yang dilaksanakan oleh instansi-instansi tersebut serta kemitraan yang terjalin dengan pihak swasta/lembaga masyarakat dan pihak institusi pendidikan yang turut serta dalam program-program pemerintah kabupaten.



Gambar 2. Model Tata Kelola Akselerasi Penyelenggaraan Pendidikan

Pihak swasta atau lembaga masyarakat diberikan peran dalam penyediaan dan pengelolaan sarana, alat dan infrastruktur pendukung penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, mereka juga diberikan peran partisipatif dalam penyediaan dukungan tenaga pengajar, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara dan *part time*. Tentu saja peran mereka ini perlu difasilitasi melalui kebijakan insentif yang dikelola oleh pemerintah kabupaten. Kebijakan insentif dimaksudkan memberikan daya tarik komparatif bagi mereka untuk turut serta dalam pengelolaan pendidikan di wilayah Pesisir Barat.

Pihak ketiga yang juga perlu dikelola perannya yaitu perguruan tinggi dan institusi pendidikan lainnya. Peran mereka lebih bersifat kepada pembangunan kapasitas jangka panjang elemen pendidikan di wilayah Pesisir Barat. Peran mereka diantaranya adalah sebagai tenaga ahli perencana program pendidikan yang melakukan analisis dan konsultasi penyusunan program yang dirancang agar mampu menciptakan akselerasi penyelenggaraan pendidikan dalam periode tertentu. Selain itu, posisi mereka juga sebagai pendamping dan evaluator terhadap program-program inovasi pembelajaran di sekolah. Hal ini penting mengingat peningkatan kapasitas memerlukan konsistensi pelaksanaan tahapan guna memaksimalkan hasil dan dampak yang dikehendaki.

Secara keseluruhan, koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan kemitraan tersebut mungkin relatif mudah dikembangkan, karena mudah bagi para pelaku yang terlibat untuk melihat manfaatnya. Berbagi sumber daya juga dipandang penting mengingat kurangnya sumber daya yang efektif, membuat mereka bergantung satu sama lain. Batasan yang mungkin perlu diantisipasi adalah koordinasi yang terkoneksi dengan jarak dan faktor geografis (Palm dan Ramsell, 2007). Oleh karena

itu guna mengoptimalkan operasionalisasi model tersebut diperlukan strategi yang mampu menggerakkan seluruh komponen untuk mencapai tujuan bersama. Strategi tersebut dapat disusun dalam tahapan sebagai berikut:

1. Membangun kapasitas. Dalam rangka memperoleh sumberdaya luar, institusi terlibat membutuhkan kapasitas yang cukup baik dalam aspek pengetahuan ataupun keterampilan. Kapasitas institusi dibangun dengan proses pendampingan terus menerus oleh Dinas Pendidikan pada wilayah sasaran yang telah memenuhi kriteria layak untuk dimitrakan. Peningkatan kapasitas berwujud pelatihan ataupun pendampingan langsung dalam secara nyata diberikan oleh fasilitator dan beberapa pihak terkait.
2. Menguatkan peranan dan fungsi pihak swasta dan masyarakat fasilitator kemitraan. Wujud konkret dari peran Dinas Pendidikan pada koordinasi akselerasi pendidikan salah satunya adalah memfasilitasi kemitraan antara masyarakat dengan beberapa pihak. Peran Dinas Pendidikan yang dapat dilakukan dalam kemitraan adalah: (1) Mengembangkan kebijakan bersama dengan pemerintah daerah yang terkait dengan kemitraan; (2) Mengembangkan basis data dan sistem informasi bagi kebutuhan kemitraan; (3) Menggalang sumberdaya luar guna mendanai program masyarakat dan mendampingi peningkatan kapasitas sekolah/unit belajar; (4) Mengembangkan sistem kemitraan yang transparan, partisipatif dan akuntabel dan (5) Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang meningkatkan kapasitas sekolah/unit belajar dan komunitas masyarakat dalam kemitraan.
3. Perlu peningkatan kapasitas baik bagi sekolah/unit belajar maupun komunitas masyarakat dalam menjalankan peran untuk memfasilitasi kemitraan. Peningkatan kapasitas itu dilakukan dengan berbagai pelatihan dan pendampingan. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan perlu menggalang kerjasama dengan beberapa pihak. Secara luas diarahkan bisa menggalang kerjasama dengan program-program lain, perguruan tinggi, LSM dan lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan.
4. Memfasilitasi pemasaran sosial. Guna mengimplementasikan program akselerasi pendidikan di wilayah kabupaten, maka para aktor yang terlibat harus memperkenalkan program kepada pihak luar. Oleh karena program dihasilkan berupa produk gagasan sosial, maka bentuk pemasaran yang dilakukan adalah pemasaran sosial. Keberhasilan pemasaran sosial bukan sekedar diukur dari tergalangnya sumberdaya akan tetapi juga berwujud dukungan-dukungan kebijakan dan penggunaan metodologi yang telah diperkenalkan oleh program secara luas. Fasilitasi pemasaran dilakukan pada semua aras, baik itu di kelurahan, kota maupun nasional. Fasilitasi kemitraan di tingkat kelurahan didampingi oleh komunitas masyarakat, pada tingkat

kabupaten dilakukan oleh lembaga masyarakat/ swasta dengan pendampingan Dinas Pendidikan.

5. Membangun Jejaring. Kunci dalam menggalang kemitraan salah satunya adalah memiliki jejaring dengan berbagai pihak yang terkait dengan isu-isu program yang hendak dimitrakan. Program akselerasi penyelenggaraan pendidikan mendorong seluruh stakeholder guna aktif terlibat pada forum-forum multipihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Fasilitasi juga dilakukan guna pihak tersebut dapat menjadi bagian dari berbagai jaringan yang terkait dengan isu program, baik itu jaringan program-program sosial, ekonomi maupun lingkungan.

SIMPULAN

Berdasarkan proses analisis yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kondisi existing sumber daya pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat masih menghadapi kondisi kuantitas sekolah yang belum seluruhnya memenuhi rasio nasional. Selain itu, distribusi guru juga masih belum merata, cenderung menumpuk pada daerah tertentu. Kondisi tersebut sejalan dengan kondisi anggaran yang belum secara optimal dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Barat, sehingga belum dapat secara maksimal menghasilkan program yang dapat mengakselerasi pendidikan di daerah tersebut.

Faktor yang paling dominan mempengaruhi kondisi sumber daya pendidikan di wilayah Kabupaten Pesisir Barat itu antara lain dikarenakan warisan kebijakan pendidikan dari kabupaten induk yang memang tidak berhasil menciptakan pemerataan infrastruktur pendidikan. Selain itu, kondisi daya dukung infrastruktur di wilayah Pesisir Barat yang belum mengalami kemajuan juga memberikan efek yang belum maksimal bagi terciptanya akselerasi pendidikan di wilayah tersebut. Contohnya adalah kondisi infrastruktur listrik dan telekomunikasi.

Potensi kelembagaan dan hubungan antar lembaga di wilayah Kabupaten Pesisir Barat sesungguhnya terletak pada Dinas Pendidikan, Dinas atau Instansi pemerintah lainnya pada Kabupaten Pesisir Barat, pihak swasta/ yayasan atau lembaga masyarakat serta instansi pendidikan yang ada di luar wilayah Pesisir Barat. Keseluruhan lembaga tersebut memiliki format keterlibatannya masing-masing, namun akan tetap terjalin dalam suatu kerangka kerja yang diarahkan oleh Pemkab Pesisir Barat. Pada format inilah diharapkan akan tercipta akselerasi kebijakan pendidikan.

Model yang dapat dioperasionalkan guna membangun tata kelola akselerasi penyelenggaraan pendidikan pada wilayah Pesisir Barat adalah model yang mengadaptasi model *New Public Management* dengan memperkuat aspek kemitraan dan koordinasi vertical dan horizontal yang kuat. Guna mengimplementasikan model tersebut maka dapat diadopsi strategi yang terdiri dari empat tahapan yaitu; penguatan kapasitas, penyusunan peran, pemasaran bersama dan penguatan jejaring.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.A. (2011). Kajian dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan daerah (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat). Bogor: IPB.
- Boron, S.M. & Thomson, G. (2017). Sustainability Education: Towards Total Sustainability Management Teaching. In F. W. Leal, L. Brandli, P. Castro, dan J. Newman, Handbook of Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education. World Sustainability Series. (pp. 37-51). London: Springer.
- Christensen, T. (2012). Post-NPM and changing public governance. *Meiji Journal of Political Science and Economics*, 1, (1), 1-11.
- Dobbins, M.K. (2014). Higher Education Governance and Policy Change in Western Europe: International Challenges to Historical Institutions. London: Springer.
- Dunia, B. (2013). Mendayagunakan Guru dengan Lebih Baik: Memperkuat Manajemen Guru untuk Meningkatkan Efisiensi dan Manfaat Belanja Publik. Jakarta: Bank Dunia.
- Habibi, M.M. (2015). Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28, (2), 117-124.
- Palm, J.E.R. (2007). Developing Local Emergency Management by Co-Ordination Between Municipalities in Policy Networks: Experiences from Sweden. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 15, (4), 173-182.
- Jeong, D.W., Lee, H.J. & Cho, S.K. (2017). Education decentralization, school resources, and student outcomes in Korea. *International Journal of Educational Development*, 53, 12-27.
- Khairunnisa, (2013). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP Di Jawa Barat. Bogor: IPB.
- Klijn, E.H. (2011). Public Management and Governance: a comparison of two paradigms to deal with modern complex problems. In D. Levi-Faur (ed.), The Oxford Handbook of Governance. Oxford: Oxford University Press.
- Lægreid, P. and K.Verhoest (eds.) 2010. Governance of Public Sector Organizations. Proliferation, autonomy and performance. London: Palgrave Macmillan.
- Lambelanova, R. (2017). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Di Kabupaten Bandung Barat. *Sosiohumaniora*, 19, (2), 185-198.
- Lau, W. (2015). Means to an End: A Comparative Review of Finland and Singapore's Basic Education System. Lund: Lund University.
- Liu, Q. & Li, X. (2016). Symbiotic Harmony: The Realistic Way to Develop Teacher-Student Relationship in University. 2nd Asia-Pacific Management and Engineering Conference (APME 2016) (pp. 697-702). Shanghai: DEStech Publications, Inc.
- Londa, V. Y. (2016). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan (Studi di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara). *Sosiohumaniora*, 18, (3), 273-281.
- Marzuki, (2015, 7 23). Kepala Dinas Pendidikan Pesisir Barat. (S. S. Hutagalung, Interviewer)
- Meha, A.M. (2013). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penempatan Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sumba Timur (Doctoral dissertation, Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana FKIP-UKSW).
- Nurmandi, A. (2013). Pemekaran dan Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau. Seminar Nasional Menyongsong Pemilu 2014: Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Politik Indonesia Berkemajuan (pp. 16-38). Makasar: Prodi Ilmu Pemerintahan UMM.
- Oswald, D.P. Coutinho, M.J., Best, A.M. & Singh, N.N. (2016). Ethnic Representation in Special Education. *The Journal of Special Education*, 32, (4), 194-206.
- Paulus, R. D. (2013). Implementasi Kebijakan Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1, (1), 1-14.
- Pohan, Z.S. (2015). Analisis Dampak Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara 2008-2014 Terhadap Perkembangan Pembangunan Kabupaten Labuhan batu Utara. *Politika*, 6, (2), 25-53.
- Pollitt, C. (2003). The Essential Public Manager. Maidenhead: Open University.
- Pollitt, C. & G. Bouckaert. (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis – NPM, Governance and the Neo-Weberian State. 3.Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Rubington, E. & Weinberg, M. (2015). Deviance: The Interactionist Perspective. London: Routledge.
- Scruton, H. & McNamara, J. (2015). An Interactionist Approach to Learning Disabilities. *International Journal of Education*, 7, (4), 43-52.
- Sulisworo, D. Nasir, R. & Maryani, I. (2017). Identification of teachers' problems in Indonesia on facing. *International Journal of Research Studies in Education*, 6, (2), 81-90.

- Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi dan Pengembangan Kota di Indonesia. *Populasi*, 10, (2), 57-72.
- Zulyanto, A., Noeraini, A.A., Badriah, L.S. & Istikomah, N. (2017). *Pencapaian MGDs di Indonesia*. Bandung: Unpad Press.